

LAPORAN PENELITIAN

PROFIL PENDIDIKAN BERBASIS GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

CLUSTER KELEMBAGAAN



DISUSUN OLEH:

1. **PENELITI UTAMA** : Dra. RISWANI, M.Ed.
2. **ANGGOTA** : RITA SUSANTI, S.Psi., MA.
NURHASANAH BAKHTIAR, M.Ag.
ELISANOVI, SE, MM, Ak, CA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Bi-ism Allah al-Rahman al-Rahim

Syukur Alhamdulillah diucapkan kepada Allah SWT yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*PILIHAN DIANTARA YANG PRO DAN KONTRA (KEPUTUSAN MAHASISWI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU MEMILIH CADAR SEBAGAI PAKAIAN YANG MENUTUP AURAT)*”.

Shalawat dan salam tak lupa pula disampaikan kepada Rasulullah SAW. yang telah membawa umat dari kebodohan menjadi berilmu pengetahuan.

Teristimewa peneliti mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan untuk menerbitkan buku ini. Semoga Allah SWT meridhai segala bantuannya, *amin ya rabbal a'lam*.

Pekanbaru, Desember 2017

Tim Peneliti

ABSTRAK

PROFIL PENDIDIKAN BERBASIS GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa data statistik yang menjadi basis pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data tersebut dikumpulkan secara terpusat tanpa memperhatikan konstektualitas dan tidak mampu mengungkap perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, mengakibatkan kesulitan dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada. Kesetaraan dan keadilan gender belum mencapai tahapan yang diharapkan semua pihak dan belum tersajinya data terpilah gender secara lengkap walaupun ada masih bersifat parsial, dan ketersediaan data terpilah gender menjadi suatu kebutuhan semua pihak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat profil pendidikan berbasis gender di Perguruan Tinggi Islam dan Madrasah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods*, yakni metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi (seperti dalam tahap pengumpulan data). Penelitian ini dilaksanakan di 6 (enam) kabupaten/kota. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, tools penilaian gender yang diadopsi dari alat penilaian gender yang dikembangkan oleh UIN Alauddin Makassar. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi indeks sumber daya berbasis gender yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif, kedua jenis data tersebut dianalisis secara berbeda. Data kuantitatif dianalisis dengan cara deskriptif persentase sedangkan data kualitatif dianalisis dengan cara transkripsi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti diperoleh bahwa secara umum madrasah di Propinsi Riau sudah mulai mengenal program sekolah berwawasan gender dan sudah punya keinginan untuk menjalankannya; dari temuan lapangan capaian sekolah pada indikator sekolah berwawasan gender cukup baik namun demikian hal ini belum karena sekolah sudah menjalankan program akan tetapi karena secara umum selama ini tidak ditemukan masalah yang serius tentang bias gender di sekolah; secara umum MTsN capaiannya lebih rendah dari jenjang sekolah lainnya; dan standar Sarana dan Prasarana merupakan indikator yang paling rendah capaiannya pada semua jenjang sekolah.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Identifikasi Masalah Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah Penelitian.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gender.....	13
1. Pengertian Gender.....	13
2. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam.....	16
B. Kebijakan Pendidikan Berbasis Gender.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	25
B. Subjek Penelitian.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data Penelitian.....	28
B. Hasil Penelitian.....	37
C. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR REFERENSI	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1 Subjek Penelitian.....	26
Tabel IV.1 Kabupaten dan Kota.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Capaian Standar Siswa	38
Gambar 4.2	Capaian Standar Mahasiswa.....	39
Gambar 4.3	Capaian Standar Kependidikan.....	40
Gambar 4.4	Capaian Standar Tenaga Pendidik.....	40
Gambar 4.5	Capaian Sekolah Pada Srandar Pengelolaan MIN.....	41
Gambar 4.6	Capaian Sekolah Pada Srandar Pengelolaan MTsN.....	42
Gambar 4.7	Capaian Sekolah Pada Srandar Pengelolaan MAN.....	43
Gambar 4.8	Capaian Sekolah Pada Srandar Isi MIN.....	44
Gambar 4.9	Capaian Sekolah Pada Srandar Isi MTsN.....	44
Gambar 4.10	Capaian Sekolah Pada Srandar Isi MAN.....	45
Gambar 4.11	Capaian Sekolah Pada Standar Proses MIN.....	46
Gambar 4.12	Capaian Sekolah Pada Standar Proses MTsN.....	46
Gambar 4.13	Capaian Sekolah Pada Standar Proses MAN.....	46
Gambar 4.14	Capaian Sekolah Pada Srandar Sarana dan Prasarana MIN.	47
Gambar 4.15	Capaian Sekolah Pada Srandar Sarana dan Prasarana MTsN.....	48
Gambar 4.16	Capaian Sekolah Pada Srandar Sarana dan Prasarana MAN.....	48
Gambar 4.17	Capaian Sekolah Pada Srandar Pembiayaan.....	49
Gambar 4.18	Capaian Sekolah Pada Srandar Penilaian.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Instrumen Penelitian	61
Lampiran B Dokumentasi Penelitian	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana formal dalam mentransfer nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, pengetahuan dan nilai-nilai gender (Adriana, 2009). Pendidikan memberikan kontribusi yang berkualitas bagi pembangunan bangsa dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam pendidikan telah menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender secara menyeluruh (Fitrianti & Habibullah, 2012). Hal senada diungkapkan oleh Suryadi & Idris (2004) sistem pendidikan yang belum menerapkan kesetaraan gender dapat menjadi faktor ketidaksetaraan gender dalam semua sektor seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat, sampai masalah mengeluarkan pendapat.

Ada beberapa aturan yang sudah disahkan oleh pemerintah terkait dengan hak memperoleh pendidikan. Pertama, UUD 1945 mengamanatkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan, termasuk dalam memperoleh pendidikan. Kedua, GBHN 1999 menjelaskan dua pokok kebijakan pendidikan yakni *pertama*, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, *kedua*, melakukan pembaharuan sistem pendidikan, termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keragaman peserta didik. dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam pasal-pasal yang

mendukung kesetaraan pendidikan yang menjadi hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, dalam pasal 48 berbunyi “wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”. Ketiga, UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan (Pasal 7). Dengan demikian, Indonesia telah menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin dalam memperoleh pendidikan.

Peningkatan taraf pendidikan dapat menghilangkan diskriminasi gender dan memberikan ruang bagi perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan, ekonomi, sosial dan politik. Diskriminasi gender ini berupa membatasi hak memperoleh pendidikan pada salah satu jenis kelamin seperti di masyarakat perempuan dibatasi dalam memperoleh pendidikan. Pembatasan ini akan berdampak pada kualitas kepribadian perempuan dan kesehatan anggota keluarganya. Perempuan sebagai pemegang peran domestik dalam keluarga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta juga ikut serta dalam penggerak roda pembangunan. Kaum perempuan juga merupakan tiang keluarga, dimana perempuan banyak memberikan kontribusi dalam manajemen rumah tangga, perawatan kesehatan anggota keluarga dan pendidikan anak (UNDP, 1996). Serta perempuan juga sebagai alokator pendapatan dan pengambil kebijakan dalam distribusi pengeluaran

keuangan (Boozer, Ranis, Stewart & Suri, 2003). Dalam hal ini, Kepribadian perempuan dan laki-laki yang berkualitas akan dapat membuat keluarganya menjadi lebih sehat dan dapat memberikan pendidikan yang lebih bermutu pada anak-anaknya serta dapat memperoleh pekerjaan yang layak dalam menunjang ekonomi keluarga. Dengan hal ini, pendidikan dapat meningkatkan kualitas kepribadian yang baik bagi perempuan dan laki-laki.

Perempuan atau laki-laki yang mendapatkan pendidikan diharapkan akan memiliki kepribadian yang berkualitas. Dengan berkualitasnya kepribadian perempuan ataupun laki-laki akan dapat membuat keluarganya lebih sehat dan memberikan pendidikan yang lebih bermutu pada anak-anaknya. Selain itu, dengan pendidikan tinggi memiliki peluang mendapatkan pekerjaan yang baik dan memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik. Diskriminasi yang terjadi di masyarakat kadang kala terjadi pada satu jenis kelamin. Jenis kelamin yang rentan untuk mengalami diskriminasi adalah perempuan. Banyak ditemukan di masyarakat perempuan memiliki pendidikan yang rendah sehingga berdampak pada kualitas keluarga dan kesehatan anggota keluarganya.

Perempuan sebagai pemegang peran domestik dalam keluarga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta juga ikut serta dalam penggerak roda pembangunan. Kaum perempuan merupakan tiang keluarga, dimana perempuan banyak memberikan kontribusi dalam manajemen rumah tangga, perawatan kesehatan anggota keluarga dan pendidikan anak (UNDP, 1996). Serta perempuan juga sebagai alokator pendapatan dan

pengambil kebijakan dalam distribusi pengeluaran keuangan (Boozer, Ranis, Stewart & Suri, 2003).

Dalam pandangan Hukum Islam, nilai gender tertuang dalam Al-qur'an dan Hadist sebagai sumber pokok dari Hukum Islam. Islam menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan kaum pria sehingga mereka bisa saling membantu dalam mengisi kehidupan. Laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik berbeda yang dapat menjadi potensi untuk saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah berfirman “ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Ayat ini dapat diartikan bahwa Islam terhadap perempuan dan laki-laki bahwa mereka tidak berbeda baik dalam mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban. Kaum perempuan dijadikan pasangan kaum laki-laki dalam beramar ma'ruf nahi mungkar baik dalam pekerjaan maupun aktifitas yang lebih luas seperti berdakwah dalam menegakan kebenaran, baik melalui lisan, tangan dan kebajikan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa islam memberikan ruang gerak yang luas bagi perempuan untuk ikut serta dalam membangun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini terlihat juga bahwa islam juga melihat kesetaraan gender.

Kesetaraan gender (gender equity) diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi disegala bidang. Upaya dalam mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya ini diwujudkan dalam kebijakan Negara maupun dalam kebijakan formal yang responsif gender. Salah satu kebijakan kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam bidang pendidikan.

Kebijakan Pendidikan yang berdasarkan pada kesetaraan gender bukanlah berarti mempertentangkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Namun Kebijakan pendidikan ini sebagai upaya menciptakan hubungan yang serasi atau sama antara laki-laki dan perempuan, dimana adanya pemberian kesempatan terbuka bagi laki-laki dan perempuan. Pengembangan kebijakan pendidikan kesetaraan ini sangat penting, ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dalam kebijakan pendidikan ini yakni, *Pertama*, membuka kesempatan pendidikan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. *Kedua*, mengeliminasi semua bentuk ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan, atau program studi di tingkat pendidikan menengah dan tinggi sehingga terwujud kesetaraan gender dalam berbagai bidang keahlian profesionalisme. *Ketiga*, memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi secara optimal pada semua unit dan dalam seluruh tahapan pembangunan pendidikan. Dalam pengembangan pendidikan kesetaraan gender ini dapat terwujud dengan mengetahui jumlah

sumber daya manusia atas dasar gender pada semua bidang dan semua tingkat pendidikan.

Indonesia saat ini telah banyak mencapai perbaikan dalam hal kesetaraan gender khususnya dalam akses pendidikan. Indonesia juga berada pada jalur yang tepat dalam upaya pencapaian *Millennium Development Goals* untuk pendidikan dasar universal dan paritas gender. Dimana tujuan umum dari Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*) adalah mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (ANFPA, 2003). Dan kemudian pada September tahun 2015 PBB juga mengeluarkan program pembangunan berkelanjutan dan Indonesia ikut bergabung dengan program tersebut, program itu dinamakan dengan "*Sustainable Development Goals (SDGs)*" SDGs ini memiliki 17 program dan direncanakan untuk 15 tahun kedepan atau sering disebut dengan agenda 2030.

Dalam SDGs ini isu gender merupakan agenda pembangunan, dengan tujuan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Adapun target yang ingin dicapai adalah *pertama*, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun. *Kedua*, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia, kekerasan seksual, dan berbagai jenis eksploitasi. *Ketiga*, menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini dan pernikahan paksa serta sunat perempuan. *Keempat*, mengenali dan menilai pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur

dan kebijakan perlindungan sosial dan keluarga secara tepat. *Kelima*, menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi dan publik. *Keenam*, memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual, reproduksi dan hak reproduksi. . (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2016)

Realitasnya, penerapan kebijakan pendidikan gender ini disadari belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Hal ini tergambar dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG dihitung melalui tiga aspek yaitu aspek kesehatan, pemberdayaan dan status ekonomi. Aspek kesehatan berkaitan dengan tingkat kematian ibu dan tingkat kelahiran pada remaja. Aspek pemberdayaan berkaitan dengan proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen dan proporsi penduduk 25 tahun ke atas dengan pendidikan menengah dan tinggi untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan aspek status ekonomi terkait dengan partisipasi dalam pasar tenaga kerja perempuan. Nilai IKG berkisar antara 0 sampai 1, semakin besar nilai IKG semakin besar ketimpangan gender. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2016).

Kesetaraan gender dalam pendidikan mencakup pengalaman murid laki-laki dan perempuan di sekolah. Pengalaman tersebut seperti perlakuan yang sama oleh guru, kurikulum, buku teks, materi pembelajaran. Pendidikan merupakan kunci dalam peningkatan sumber daya manusia termasuk dalam

meningkatkan kapabilitas individu dan membantu individu dalam merencanakan masa depan.

Berdasarkan data BPS tahun 2015 tentang kesenjangan partisipasi pendidikan antar jenis kelamin dapat dilihat angka harapan lama sekolah. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa capaian perempuan sedikit di atas laki-laki, dimana capaian angka lama harapan sekolah perempuan 12,68 sedangkan laki-laki 12,42. Faktor yang menyebabkan hal ini adalah tekanan ekonomi dimana tingginya tuntutan anak laki-laki untuk bekerja. Hal ini berdampak pada kondisi putus sekolah. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya pekerja anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, ini ditunjukkan dengan persentase jumlah pekerja anak laki-laki pada tahun 2015 sebanyak 7,10 % dan perempuan 4,82%.

Perhitungan indeks peningkatan partisipasi sekolah pada perempuan dan laki-laki juga dalam dilihat dari data peluang pendidikan kesetaraan gender pada berbagai provinsi, dimana laporan BPS 2015 menunjukkan peluang sekolah bagi laki-laki dan perempuan sudah hampir setara pada Kepulauan Riau. Dimana IPM laki-laki dan perempuan di Riau berada pada kelompok capaian sedang (60-70). Namun berdasarkan IPG (indeks Pembangunan Gender) pada Provinsi Riau dan 23 Kota lainnya termasuk dalam dalam IPG dibawah 90 artinya capaian pembangunan manusia masih dalam kategori rendah. Artinya ini berarti ketidakadilan gender diberbagai bidang masih merupakan masalah yang akan dihadapi masa mendatang.

Tantangan yang dihadapi adalah masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Program-program pembangunan pendidikan berbasis gender merupakan program lintas bidang dan lintas program, sehingga diperlukan koordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Sistem pemerintahan serta lembaga-lembaga dari tingkat pusat hingga daerah yang belum sepenuhnya responsive gender dapat meminggirkan peran perempuan maupun laki-laki secara sistematis melalui kebijakan dan program.

Data statistik yang menjadi basis pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data tersebut dikumpulkan secara terpusat tanpa memperhatikan konstekstualitas dan tidak mampu mengungkap perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, mengakibatkan kesulitan dalam menemukenali masalah-masalah gender yang ada. Kesetaraan dan keadilan gender belum mencapai tahapan yang diharapkan semua pihak dan belum tersajinya data terpilah gender secara lengkap walaupun ada masih bersifat parsial, dan ketersediaan data terpilah gender menjadi suatu kebutuhan semua pihak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang pemberdayaan gender. Dengan mengacu pada pedoman ini, maka penelitian ini menyediakan bahan-bahan perumusan kebijakan yang berupa penyelenggaraan data gender yang bersifat lokal sehingga kesetaraan gender dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan bisa terwujud. Data gender diambil di lingkungan Perguruan Tinggi Islam (Swasta dan Negeri) dan sekolah-sekolah Madrasah MIN sampai MA (Swasta dan Negeri).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada penggalian data gender yang menyangkut isu bidang pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Islam (Swasta dan Negeri) dan Sekolah Madrasah MIN sampai MA (Swasta dan Negeri).

C. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini dengan rumusan masalah:

1. Profil gender pada pendidikan di perguruan tinggi islam dan pendidikan madrasah MIN sampai MA di lihat dari komponen pengawasan, kepada sekolah, guru, pegawai admistrasi, dan siswa berdasarkan kesetaraan gender.

2. Profil manajemen pendidikan diberbagai lembaga pendidikan di Perguruan Tinggi Islam dan Sekolah Madrasah MIN sampai MA berkesetaraan gender.
3. Penyelenggaraan manajemen pendidikan pada setiap jenjang pendidikan
4. Proses kesetaraan gender pada perguruan tinggi islam dan sekolah madrasah MIN sampai MA.
5. Penerapan kesetaraan gender dalam proses penyelenggaraan manajemen pendidikan di perguruan tinggi islam dan sekolah madrasah MIN sampai MA.

D. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana profil pendidikan berbasis gender di Perguruan Tinggi Islam dan madrasah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi profil pendidikan berbasis gender di Perguruan Tinggi Islam dan madrasah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Profil pendidikan berbasis gender di Perguruan Tinggi Islam dan Madrasah
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi profil pendidikan berbasis gender di Perguruan Tinggi Islam dan Madrasah

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Tersedianya data base dalam bentuk buku profil sumber daya manusia berbasis gender di lingkungan kementerian agama provinsi Riau
2. Data gender untuk memberikan acuan bagi pemerintah bidang pendidikan di lingkungan kementerian agama dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.
3. Tersedianya base data gender dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan program yang berbasis gender pendidikan Islam di lingkungan kementerian agama provinsi Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gender

1. Pengertian Gender

Gender dalam dimaknakan sebagai suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Tierney.1989). menurut Fakih, (2005) bahwa gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan, artinya adanya perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.

Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Pengertian gender menurut Caplan (1987) adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan cultural. Definisi yang lain disebutkan oleh Bem (1981) bahwa gender merupakan karakteristik kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh peran gender yang dimilikinya dan dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi yaitu maskulin, feminisme, androgini dan tak tergolongkan. Maskulin diartikan sifat kelaki-lakian diatas rata-rata, sifat kurang dari rata-rata. Ciri-ciri yang berkaitan dengan gender yang lebih umum terdapat pada laki-laki, atau suatu peran atau *trait* maskulin yang

dibentuk oleh budaya. Sehingga sifat ini dipercaya adalah sifat bagi laki-laki. Tipe feminisme merupakan sifat kewanitaannya di atas rata-rata sifat laki-lakiannya kurang dari rata-rata. Ciri atau sifat yang umum terdapat pada wanita dan merupakan sifat ideal bagi wanita. Sedangkan tipe androgini adalah sifat laki-lakiannya maupun kewanitaannya di atas rata-rata. Terakhir adalah tipe tidak tergolongkan yakni sifat laki-lakiannya maupun kewanitaannya di bawah rata-rata. Tingginya kehadiran karakteristik maskulin dan feminisme yang diinginkan pada satu individu pada saat yang bersamaan (Snatrock, 2003).

Pandangan mengenai gender dapat diklasifikasikan pertama, kedalam dua model yaitu *equity model* dan *complementary contribution model*, kedua kedalam dua *stereotype* yaitu *sex role stereotypes* dan *managerial stereotypes*. Model pertama mengasumsikan bahwa antara laki-laki dan wanita sebagai profesional adalah identic sehingga perlu ada satu cara yang sama dalam mengelola dan wanita harus diuraikan akses yang sama. Model kedua berasumsi bahwa laki-laki dan wanita mengelola dan cara menilai, mencatat serta mengkombinasikan untuk menghasilkan suatu sinergi (Trisnaningsih, 2002).

Pandangan lain yang dikemukakan oleh Oakley (1972) menyebutkan bahwa gender adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut Zainuddin, (2006) gender sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing. Makna yang sama juga dikemukakan oleh Eviota, (1992) bahwa

gender adalah konstruksi dan tatanan sosial mengenai berbagai perbedaan antar jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki atau suatu sifat yang telah ditetapkan secara sosial maupun budaya.

Menurut Unger & Crawford (1992) menyatakan gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial bukan berdasarkan perbedaan biologis semata. Hal yang sama dikemukakan oleh Moser (1993) gender adalah peran sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Perbedaan peran gender ini terbentuk oleh factor-faktor ideologis, sejarah, etnis, ekonomi dan kebudayaan. Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan bukan secara biologis, melainkan terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dapat berubah sementara jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah (Grewal & Kaplan, 2002).

Sedangkan Mosse (1996) menyebutkan gender merupakan seperangkat peran yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, bukan secara biologis dan peran ini dapat berubah sesuai dengan budaya, kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. Gender menentukan berbagai pengalaman hidup, yang dapat menentukan akses terhadap pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya. Gender berkaitan dengan kualitas dan relasi yang terbentuk dalam hubungan kekuasaan dan dominasi dalam struktur kesempatan hidup perempuan dan laki-laki, pembagian kerja yang lebih luas dan pada gilirannya berakar pada kondisi produksi dan reproduksi

yang diperkuat oleh system budaya, agama dan ideology yang berlaku dalam masyarakat (Ostergaard, 1992). Hal lain dikemukakan oleh Bradley (2007) bahwa gender adalah suatu konstruksi sosial yang mengkategorikan perempuan dan laki-laki berdasarkan persepsi dan perasaan. Gender bervariasi berdasarkan waktu, tempat, budaya serta pengalaman hidup.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gender dapat dipahami sebagai konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya, gender dalam arti adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukan sesuatu yang bersifat kodrati.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hokum, ekonomi dan sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

2. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Umar (1999) mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-quran. Variable-variabel tersebut adalah:

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah *Ta'ala*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Zariyat ayat 56:



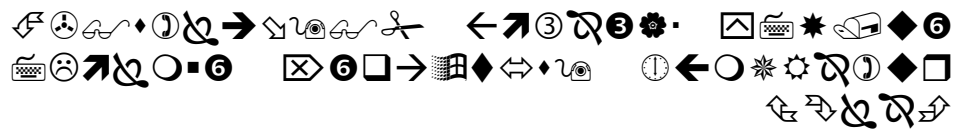
Artinya:
 “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, siapa yang banyak amal ibadahnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-qur’an biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (*Mittaqin*), dan untuk mencapai derajat muttaqin ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi juga sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ard*). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam QS. Al-An’am ayat 165:





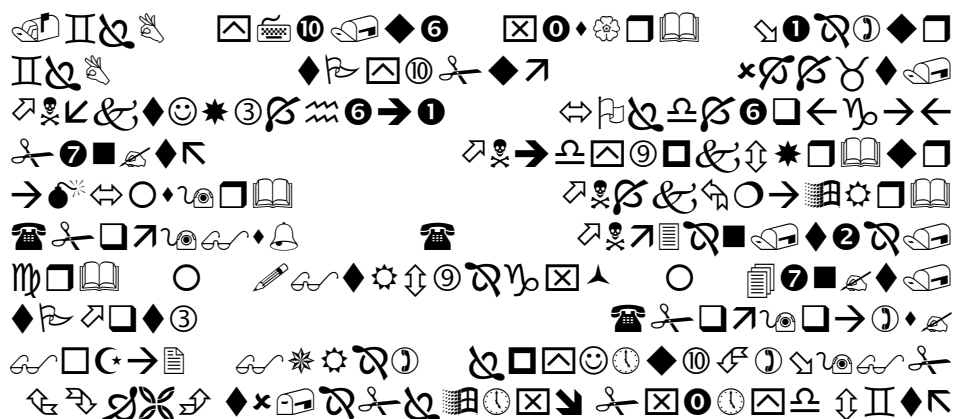
Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Khalifah dalam ayat ini tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas ke khalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

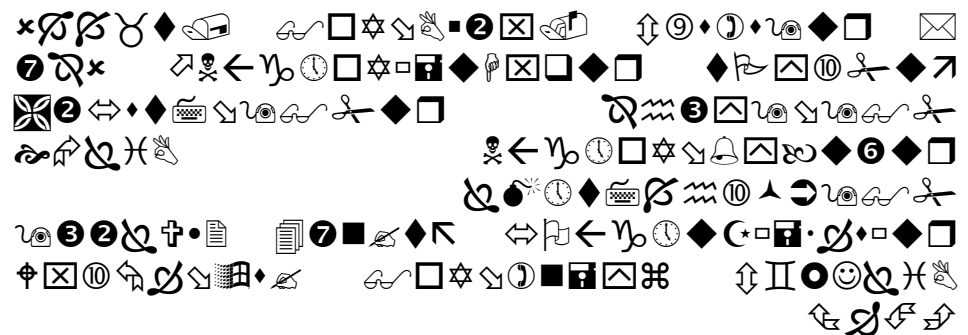
Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui bahwa menjelang seorang anak manusia lahir dari Rahim ibunya, ia berjanji terlebih dahulu menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf ayat 172:



Artinya:

“Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman: bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kami tidak mengatakan: sesungguhnya kami bani adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan”.

Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia. Dengan demikian dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Al-qur’an mempunyai pandangan positif terhadap manusia. Dalam Al-qur’an menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu adam sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Isra ayat 70:



Artinya:

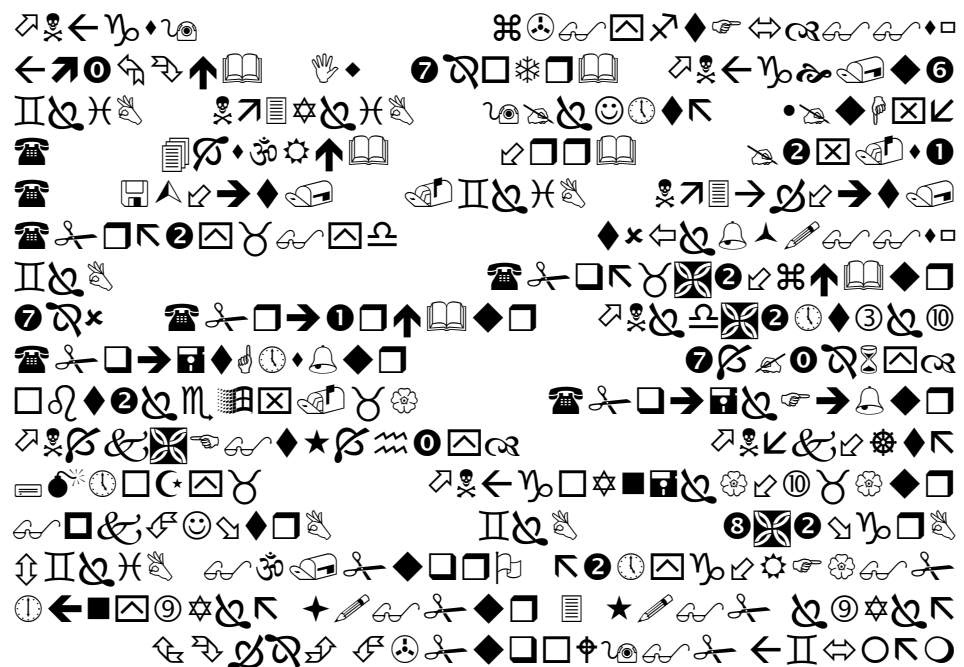
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan jenis kelamin, suku bangsa dan warna kulit. Dalam Al-qur’an tidak pernah

ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu.

d. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Peluang meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam beberapa ayat diantaranya QS. Ali-Imran ayat 195:



Artinya: “maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman : “sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di anatar kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surge yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”.

Dari ayat di atas mengisyaratkan bahwa konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier professional, tidak mesti

dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan berpeluang memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi optimal.

B. Kebijakan Pendidikan Berbasis Gender

Dalam memperjuangkan kesetaraan gender bukan berarti mempertentangkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dalam hal kesetaraan gender lebih berupaya dalam membangun hubungan yang setara antar jenis kelamin, membuka kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pendidikan, makanan yang bergizi, kesehatan, kesempatan kerja dan sebagainya (Muda, 2007).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan pendidikan nasional, maka pendidikan yang berwawasan gender menjadi pilihan yang strategis dalam meningkatkan kehidupan pendidikan yang berkesetaraan, walaupun pilihan yang berat mengingat banyaknya hambatan yang dihadapi untuk mewujudkan pendidikan yang berbasis gender. Langkah konkrit yang dapat dirumuskan untuk menerapkan kebijakan gender dalam pendidikan nasional menertapkan tujuan kebijakan tersebut. Adapun tujuan kebijakan gender pada pendidikan nasional yaitu, *pertama*, membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jurusan, jenis dan tingkat pendidikan yang lebih merata pada semua aspek kesetaraan gender. *Kedua*, mengeliminasi semua bentuk ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan, atau program studi di tingkat pendidikan menengah dan tinggi sehingga terwujud kesetaraan gender

dalam berbagai bidang keahlian profesionalisme. *Ketiga*, memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi secara optimal pada semua unit dan dalam seluruh tahapan pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program sampai kepada tahap akhir berupa evaluasi.

Dalam mewujudkan kebijakan pendidikan berbasis gender ini, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya adalah pertama perlu ditingkatkan keseimbangan jumlah guru dan tenaga kependidikan atas dasar gender pada semua bidang dan pada semua tingkatan pendidikan. Baru kemudian mengembangkan pendekatan proses pembelajaran yang sensitif gender melalui pembinaan dan pelatihan guru-guru, kepala sekoah dan pengawas pendidikan.

Pendidikan dalam kesetaraan gender merupakan perpaduan antara pendidikan dan gender. aplikasi kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan penerapan atau penggunaan peluang dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan bimbingan, baik itu pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara teratur dan sistematis kearah kedewasaan melalui bimbingan pengajaran, latihan-latihan, dan dicurahkan dalam rangka mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik ketingkat kedewasaan, dan hal ini dilakukan baik di dalam maupun di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup, demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Hal ini sejalan dengan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU sistem pendidikan nasional NO.20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1

yang menyebutkan bahwa : “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.

Dalam dunia pendidikan perlu adanya suatu kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan. Setidaknya Negara mampu untuk menyetarakan pendidikan, sehingga semua warga Negara bisa merasakan pendidikan tersebut. Hal-hal yang perlu ada dalam undang-undang pendidikan adalah:

1. Memastikan bahwa kesempatan yang sama diberikan kepada anak perempuan dan perempuan dewasa dalam semua level pendidikan, sehingga antara laki-laki dan perempuan dapat setara dalam mendapatkan pendidikan.
2. Memastikan bahwa pendidikan dasar diwajibkan untuk anak usia sekolah, berbagai upaya perlu dilakukan dengan:
 - a. Menghapuskan semua biaya pendidikan dasar untuk anak perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah
 - b. Memberikan beasiswa kepada anak-anak perempuan
3. Menghapus semua undang-undang diskriminatif yang akan mengakibatkan anak perempuan untuk tidak dapat berpartisipasi atau meneruskan pendidikan, misalnya hak murid untuk melanjutkan pendidikannya walaupun hamil dan memberikan izin cuti melahirkan, memberikan dukungan bagi perempuan untuk terus melanjutkan sekolah.

4. Memastikan bahwa dalam hubungan antara pendidikan dan permintaan tenaga pekerjaan diperhatikan keseimbangan gender sehingga baik dalam pendidikan maupun dalam tenaga kerja tidak terjadi gap gender.
5. Memperkuat hubungan antara sector pendidikan dan pelatihan-pelatihan pada lapangan pekerjaan.

Aplikasi kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan keinginan bersama, bukan hanya perempuan yang menginginkan kesetaraan dalam pendidikan akan tetapi laki-laki pun menginginkan akan hal itu, sehingga tidak terjadinya kesenjangan-kesenjangan di bidang pendidikan yang dialami oleh perempuan. Dengan adanya kesetaraan gender dalam pendidikan, maka keadilan yang ada di rumah, sekolah, maupun masyarakat akan terwujud. Hal ini dibantu dengan sebuah alat yang menghapus ketidakadilan tersebut yaitu dengan pendidikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods*, yakni metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi (seperti dalam tahap pengumpulan data), dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian (Abbas, 2010: Viii). Sedangkan menurut Creswell (2014: 5) *mix-methods* merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan menurut Johnson dan Cristensen (2007) *Mix-Methods* atau metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian). Sehingga dari berbagai definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *Mix-method* penelitian adalah penelitian yang memadukan atau mengkombinasikan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tujuan penelitian untuk melihat gambaran sumber daya manusia berbasis gender dalam mengembangkan kebijakan pendidikan berkesetaraan gender. Pendekatan ini semacam peninjauan sumber daya yang menandakan kapasitas pengarusutamaan gender.

B. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan kementerian agama provinsi Riau, yaitu perguruan tinggi Islam negeri dan madrasah negeri. Teknik pengambilan subjek penelitian ini dipilih secara Sampling Jenuh/Sensus. Berikut data subjek penelitian:

Tabel III.1 Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	MAN	MTS	MIN
1	Pekanbaru	3	3	3
2	Kampar	3	5	1
3	Dumai	1	1	1
4	Bengkalis	3	5	1
5	Indragiri Hilir	3	3	4
6	Indragiri Hulu	1	1	2
7	Rokan Hulu	1	2	2
8	Siak	0	2	0
9	Kuantan Singgingi	1	2	0
10	Rokan Hilir	0	1	1
11	Meranti	0	0	0
12	Pelalawan	0	0	0
Total		15	25	15

C. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, tools penilaian gender yang diadopsi dari alat penilaian gender yang dikembangkan oleh UIN Alauddin Makassar. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi indeks sumber daya berbasis gender yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif. Selain itu, data terpilah yang disusun dari data sekunder yang diambil langsung dari data di perguruan tinggi Islam dan madrasah.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif, kedua jenis data tersebut dianalisis secara berbeda. Data kuantitatif dianalisis dengan cara deskriptif persentase sedangkan data kualitatif dianalisis dengan cara transkripsi. Penelitian ini menggunakan transkripsi verbatim yaitu proses pencatatan apapun yang didengar dari responden dalam rekaman baik kata-kata “hmmm”, “oohh”, dan sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Provinsi Riau

1. Sejarah Provinsi Riau

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatra dengan ibukota Pekanbaru. Letak geografis Provinsi Riau di sebelah utara berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Melaka; di sebelah selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala; di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Provinsi Kepulauan Riau) dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Sejarah Provinsi Riau sebelum kemerdekaan lebih diwarnai riwayat kerajaan Melayu Islam, dengan kerajaan terbesarnya Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan yang berpusat di Kabupaten Siak ini didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rakhmad Syah pada tahun 1725. Sultan pertama ini meninggal pada tahun 1746 dan kemudian diberi gelar Marhum Buntan. Sepeninggal Marhum Buntan tercatat ada sebelas sultan yang pernah bertahta di Kerajaan Siak Sri Indrapura, yaitu:

- a. Sultan Abdul Jalil Muzaffar Syah (1746-1765). Dengan memerintah selama lebih kurang 19 tahun, Sultan kedua ini berhasil membangun Kerajaan Siak Sri Indrapura menjadi kokoh dan kuat.
- b. Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Syah (1765-1766). Nama aslinya Tengku Ismail, hanya sempat memerintah selama setahun. Masa pemerintahannya datangnya serangan Belanda yang memanfaatkan Tengku Alam (selanjutnya menjadi Sultan ke empat) sebagai perisai. Sultan Abdul Jalil kemudian gugur dan digelari Marhum Mangkat di Balai.

- c. Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (1766-1780). Sepeninggal Marhum Mangkat di Bali, Tengku Alam menduduki tahta kerajaan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah. Meninggal pada tahun 1780 dengan gelar Marhum Bukit.
- d. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muzzam Syah(1780-1782). Pada masa pemerintahannya Kerajaan Siak berkedudukan di Senapelan atau Pekanbaru sekarang. Beliau pula yang merupakan pendiri kota' Pekanbaru, sehingga setelah meninggal pada tahun 1782 digelari Marhum Pekan.
- e. Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah (1782-1784). Seperti sultan sebelumnya, Sultan Yahya juga hanya sempat 2 tahun memerintah. Meninggal pada tahun 1784 dan digelari Marhum Mangkat di Dungun.
- f. Sultan Assayaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi (1784-1810). Sultan ketujuh ini merupakan Sultan Siakpertama yang berdarah Arab dan bergelar Sayed Syarif Pada masa pemerintahannya Kerajaan Siak mencapai puncak kejayaannya. Meninggal pada tahun 1810 dan digelari Marhum Kota Tinggi.
- g. Sultan Assayaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin (1810-1815). Sultan yang bernama asli Ibrahim ini meninggal pada tahun 1815 kemudian digelari dengan Marhum Mempura Kecil.
- h. Sultan Assayaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin (1815-1854). Nama aslinya tengku Sayed Ismail dan setelah meninggal digelari Marhum Indrapura.
- i. Sultan Assayaidis Syarif Kasyim Abdul Jalil Syaifuddin (Syarif Kasyim 1,1864-1889). Meninggal tahun 1889, dan digelari Marhum Mahkota.
- j. Sultan Assayaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Muzaffar Syah (1889-1908). Atas jasa dan usaha Sultan inilah pembangunan gedung-gedung yang kini menjadi

peninggalan Kerajaan Siak. Meninggal pada tahun 1908 dan digelar Marhum Baginda.

- k. Sultan Assayaidis Syarif Kasyim Abdul Jalil Syaifuddin (Syarif Kasim II, 1915-1949). Sultan yang bernama asli Tengku Sulong ini baru naik tahta setelah 7 tahun ayahandanya Sultan Hasyim meninggal, sekaligus menjadi sultan terakhir Kerajaan Siak Indrapura. Karena pada bulan Nopember 1945, Sultan Syarif Kasim II mengirim kawat kepada Presiden Republik Indonesia yang menyatakan kesetiaannya kepada Pemerintah Republik Indonesia. Tidak hanya itu, Sultan juga menyerahkan harta bendanya untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Berikut ini profil lengkap dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri:

Nama Resmi	: Provinsi Riau
Ibukota	: Pekanbaru
Luas Wilayah	: 87.023,66 Km ² *)
Jumlah Penduduk	: 5.867.358 jiwa *)

Suku Bangsa: Melayu, Minangkabau, Bugis, Makasar, Jawa, Banjar, Batak, Mandailing, Suku Asli (Sakai, Talang Mamak, Suku Laut, Kualam Bonai, Akit).
 Agama: Islam : 4.647.864 jiwa, 88 %, Kristen Protestan: 1.848 jiwa, 1 %, Katholik : 282.000 jiwa, 5 %, Budha : 296.222 jiwa, 6 %, Hindu : 10.768 jiwa, 0.2 %.
 Wilayah Administrasi: Kab.: 10, Kota : 2, Kec.: 163, Kel.: 243, Desa : 1.592 *).

2. Geografi

Luas wilayah Provinsi Riau adalah 111.228,65 kilometer persegi (luas sesudah pemekaran Provinsi Kepulauan Riau) yang terdiri dari pulau-pulau dan laut-laut. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Laut Cina

Selatan, terletak antara 1°15′ Lintang Selatan sampai 4°45′ Lintang Utara atau antara 100°03′-109°19′ Bujur Timur Greenwich dan 6°50′-1°45′ Bujur Barat Jakarta. Daerah Provinsi Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari. Menurut catatan Stasiun Meteorologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru menunjukkan optimum pada 27,6 ° Celsius dalam interval 23,4-33,4° Celsius. Kejadian kabut tercatat terjadi sebanyak 39 kali dan selama Agustus rata-rata mencapai 6 kali sebagai bulan terbanyak terjadinya kejadian.

3. Arti Logo



Mata Rantai tak terputus yang berjumlah 45, adalah lambang persatuan bangsa dan diproklamirkan pada tahun 1945, yaitu tahun Proklamasi Republik Indonesia.

Padi dan Kapas adalah lambang kemakmuran (sandang pangan), padi 17 butir dan 8 Bunga Kapas merupakan tanggal Proklamasi 17 bulan 8 (Agustus).

Lancang Kuning mengandung, adalah lambang kebesaran Rakyat Riau, sedang sogok Lancang berkepala ikan melambangkan bahwa Riau banyak menghasilkan Ikan dan mempunyai sumber-sumber penghidupan dari laut. Gelombang lima lapis melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Republik Indonesia.

Keris berhulu Kepala Burung Serindit, adalah lambang Kepahlawanan Rakyat Riau berdasarkan pada kebijaksanaan dan kebenaran.

4. Sumber Daya Alam

Riau kaya akan sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak dan gas bumi, emas, dll. maupun kekayaan hutan dan perkebunannya, belum lagi kekayaan sungai dan lautnya. Seiring otonomi daerah, kekayaan tersebut bertahap mulai disalurkan secara penuh ke daerah (tidak sepenuhnya diberikan ke pusat) lagi. Aturan baru dari pemerintahan reformasi, memberi batasan dan aturan tegas mengenai kewajiban penanam modal, pemanfaatan sumber daya dan bagi hasil dengan lingkungan sekitar.

5. Demografi

- a. Suku bangsa: Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Minangkabau, Suku Batak, Suku Banjar, Suku Tionghoa, Suku Bugis, Suku Sunda.
- b. Bahasa: Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Bahasa Minangkabau.
- c. Agama: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu

6. Pendidikan

Riau mempunyai beberapa perguruan tinggi, di antaranya Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Negri SUSKA (Sultan Syarif Kasim), Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau. Selain itu, juga terdapat Politeknik Caltex Riau [2], dan Lembaga pendidikan dan pelatihan.

7. Pemerintahan

Tabel IV.1 Kabupaten dan Kota

No	Kabupaten	Ibu Kota
1	Kabupaten Bengkalis	Bengkalis
2	Kabupaten Indragiri Hilir	Tembilahan
3	Kabupaten Indragiri Hulu	Rengat
4	Kabupaten Kampar	Bangkinang
5	Kabupaten Kuantan Singingi	Teluk Kuantan
6	Kabupaten Pelalawan	Pangkalan Kerinci
7	Kabupaten Rokan Hilir	Bagan Siapi-api
8	Kabupaten Rokan Hulu	Pasir Pengaraian
9	Kabupaten Siak	Siak Sri Indrapura
10	Kabupaten Kepulauan Meranti	Selatpanjang
11	Kota Pekanbaru	Pekanbaru
12	Kota Dumai	Dumai

8. Perekonomian

a. Pertanian & perkebunan

Perkebunan yang berkembang adalah perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit, baik itu yang dikelola oleh negara ataupun oleh rakyat. Selain itu juga terdapat perkebunan jeruk dan kelapa. Untuk perkebunan sawit saat ini propinsi Riau memiliki perkebunan sawit seluas 1,34 juta hektar. Selain itu terdapat pula 116 pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang beroperasi dengan produksi coconut palm oil (CPO) 3.386.800 ton per tahun.

b. Hutan & ikan

Pembangunan kehutanan pada hakekatnya mencakup semua upaya memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung dan penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Namun dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu.

Hilangnya ketiga fungsi diatas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan oleh pengusahaan hutan yang tidak mengindahkan aspek kelestarian. Efek selanjutnya adalah semakin menurunnya produksi kayu hutan non HPH, sementara upaya reboisasi dan penghijauan belum optimal dilaksanakan. Masalah lain yang sangat merugikan tidak saja Provinsi Riau pada khususnya tapi Indonesia pada umumnya adalah masalah ilegal logging. Masalah ini merupakan akar dari masah lalu yang sulit sekali untuk diberantas karena ada oknum-oknum tertentu yang ikut bermain didalamnya. Ilegal logging telah menyebabkan hutan Riau habis tanpa ada proses hukum bagi mereka yang melakukannya.

c. Industri

Hasil daerah provinsi Riau antara lain: Kelapa Sawit, Kopra, Karet, Plastik, dan Kayu.

d. Pertambangan

Hasil pertambangan Provinsi Riau adalah Minyak bumi, Gas, dan Batu Bara. Transportasi

e. Keuangan & Perbankan

Provinsi Riau merupakan satu-satunya propinsi yang mempunyai BUMD di bidang transportasi udara yakni PT. Riau Airlines, yang bertujuan untuk melayani daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalan darat maupun laut. Riau Airlines mengoperasikan Fokker-50 buatan Belanda (5 armada), untuk tahun 2008 menambah 2 armada lagi dengan jenis Avro-RJ 100. Untuk perbankan di Propinsi sangat berkembang pesat, ini ditandai banyaknya bank swasta, serta adanya BUMD Bank Riau dan BPR Sarimadu.

9. Nilai Budaya

Dalam tradisi Melayu, ada semacam ungkapan "Adat Bersendikan Syarak, dan Syarak Bersendikan Kitabullah". Hal ini menyiratkan bahwa secara langsung atau tidak tradisi kebudayaan melayu tetap berpegang teguh pada ajaran Islam.

Adat dalam Melayu sangat diutamakan dan menjadi ukuran derajat seseorang. Orang yang tidak tahu adat atau kurang mengerti adat dianggap sangat memalukan dan dapat dikucilkan dari kelompok masyarakat. Ungkapan atau cap kepada mereka yang "tak tabu adat" atau "tak beradat". Begitu pentingnya sehingga timbul ungkapan lain, "Biar mati Anak, jangan mati Adat". Ungkapan lainnya adalah: "Biar mati Istri, jangan mati Adat". Semua ungkapan ini Menunjukkan betapa adat-istiadat dalam masyarakat Melayu sangat dijunjung tinggi.

"Tak kan Melayu hilang di bumi", adalah keyakinan masyarakat Melayu Riau akan tradisi dan budayanya. Kalimat ini diucapkan secara turun-temurun dan telah mendarah-daging bagi orang Melayu.

Sifat masyarakat Melayu yang terbuka menyebabkan terbentuknya tradisi yang majemuk. Tradisi luar masuk ke Kepulauan Riau sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, saat mana budaya Melayu Kuno telah bercampur dengan tradisi Hindu dan Budha. Akibat perdagangan antar daerah yang berlangsung selama puluhan tahun, masuk pula tradisi Bugis, Banjar, Minang, Jawa dan lain-lain. Semasa masuknya Portugis ke Melaka, datang pula tradisi Sunda mewarnai tradisi Melayu Riau.

Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan Melayu Riau yang paling menonjol, meliputi seni sastra, seni tari, seni suara, seni musik, seni rupa dan seni teater. Seni sastra Riau terdiri dari sastra tulis (berupa syair, hikayat, kesejarahan, kesatraan, adat istiadat dan lain-lain) dan sastra lisan seperti pantun (pepatah,

petitih, peribahasa, bidal, perumpamaan dan lain-lain), mantra cerita rakyat, koba, kayat dan nyanyi panjang. Karya seni sastra paling terkenal adalah Gurindam Dua Belas hasil karya Raja Ali Haji.

Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh penduduk adalah bahasa Melayu, yang pada hakikatnya merupakan akar bahasa Indonesia. Sehingga siapa saja yang bisa berbahasa Indonesia dapat berkomunikasi dengan orang Riau. Di beberapa lokasi ada juga penduduk yang menggunakan bahasa daerah asalnya, seperti bahasa Minang di pasar-pasar yang banyak dihuni pedagang asal Minang, atau bahasa Jawa di desa-desa yang banyak penduduknya berasal dari Jawa.

Upacara Perkawinan di Riau ditandai dengan berbagai acara, seperti: Merisik, Meminang, Menggantung, Malam Berinai, Akad Nikah, Tepung Tawar, Berinai Lebai, Berendam, Berkhatam Qur'an, Hari Lansung/Bersanding, Makan Bersuap-suapan, Makan Hadap-hadapan, Menyembah Mertua, Mandi Damai, Mandi Taman dan Mengantuk atau Mengasah Gigi. Wujud kebudayaan Melayu di Provinsi Riau sendiri sangat majemuk. Karena letak geografisnya yang sejak dulu merupakan jalur lintas perdagangan internasional memberi peluang terjadinya kontak budaya antara penduduk Melayu dengan berbagai etnis lainnya. Kontak budaya ini berlanjut dan berkembang menjadi pembauran kebudayaan sehingga terbentuk kebudayaan yang majemuk.

Selain Upacara Perkawinan, ada beberapa upacara adat yang berkembang di masyarakat Riau, yaitu:

- a. Upacara Betobo, adalah kegiatan bergotong royong dalam mengerjakan sawah, ladang, dan sebagainya.
- b. Upacara Menyemah Laut, adalah upacara untuk melestarikan laut dan isinya, agar mendatangkan manfaat bagi manusia.

- c. Upacara Menumbai, adalah upacara untuk mengambil madu lebah di pohon Sialang.
- d. Upacara Belian, adalah pengobatan tradisional.
- e. Upacara Bedewo, adalah pengobatan tradisional yang sekaligus dapat dipergunakan untuk mencari benda-benda yang hilang.
- f. Upacara Menetau Tanah, adalah upacara membuka lahan untuk pertanian atau mendirikan bangunan.

B. Hasil Penelitian

Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal, dan non formal. Terdapat 3 (tiga) pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik. Tolak ukur yang digunakan antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS) di berbagai jenjang, angka putus sekolah/ angka buta huruf, guru dan kepala sekolah. Pendidikan merupakan tolak ukur pembangunan sumber daya manusia, di samping kesehatan dan pendapatan atau faktor ekonomi. Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kualitas penduduk harus ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

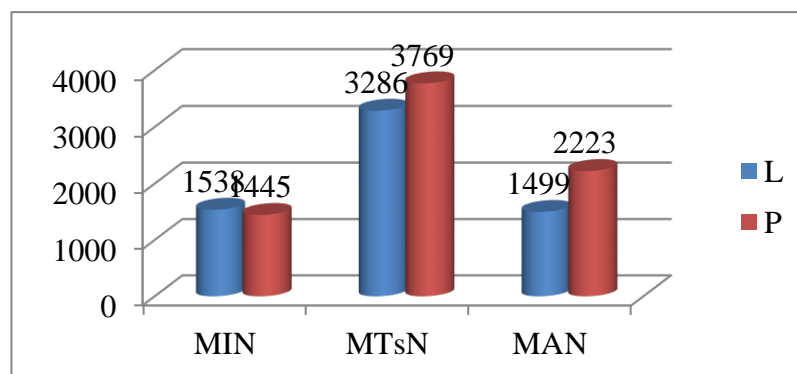
Dalam dimensi gender, perlu disajikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol, dampak, dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias gender yang

ditimbulkan. Dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 telah dicanangkan bahwa mulai tahun 1994 diberlakukan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, dianjurkan pula bahwa orang tua agar menyekolahkan anaknya, baik perempuan maupun laki-laki sekurang-kurangnya sampai menyelesaikan sekolah lanjutan pertama.

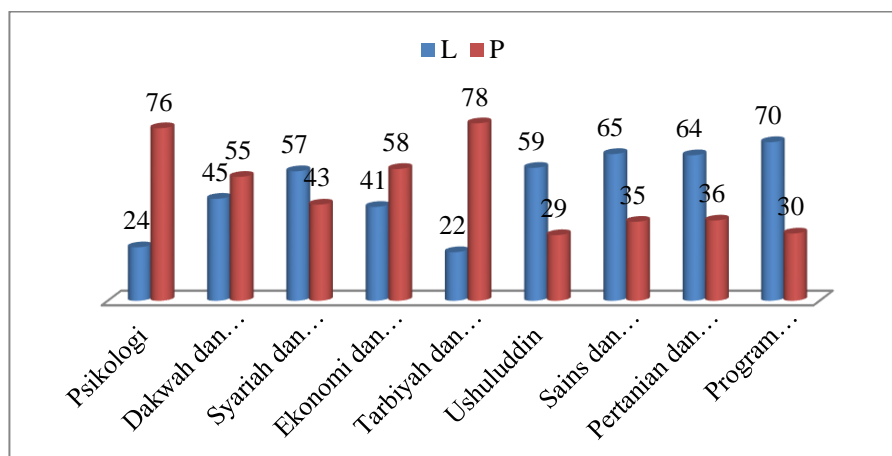
Dalam pembahasan ini akan menyajikan gambaran tentang keadaan pendidikan di Provinsi Riau yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan, yang meliputi jumlah siswa di jenjang MIN, MTsN, dan MAN di Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan manajemen sekolah berbasis gender, paling tidak memiliki tujuh komponen pendidikan yang dapat dijumpai di sekolah, antara lain:

1. Standar Siswa

Pada standar ini disebutkan bahwa jumlah siswa laki-laki dan perempuan harus berimbang sesuai kondisi. Semua siswa berhak mendapatkan fasilitas lingkungan yang responsif gender, tidak terjadi penyimpangan dan pelecehan berbasis gender sehingga semua siswa dapat kesempatan untuk berprestasi secara optimal.



Gambar 4.1. Capaian Standar Siswa



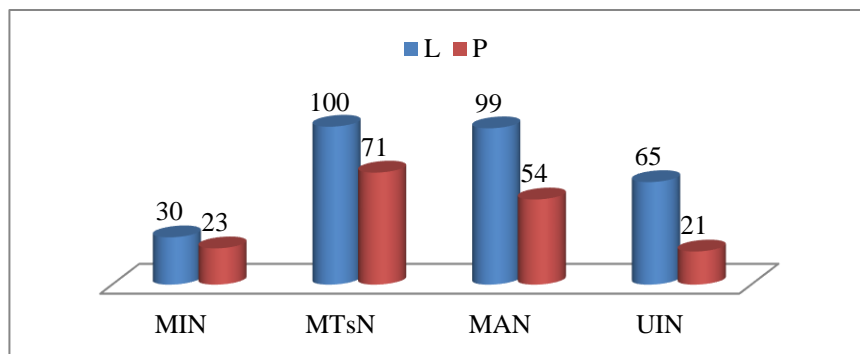
Gambar 4.2. Capaian Standar Mahasiswa UIN Suska Riau

Pada standar ini sekolah dituntut untuk tidak membedakan penerimaan antara siswa laki-laki dan perempuan. Dilihat pada grafik di atas ternyata MIN memiliki nilai capaian terendah. Hal ini terjadi karena jumlah siswa laki-laki dan perempuan pada MIN sangat ditentukan oleh kelompok sekolah yang banyak diminati masyarakat. Terdapat kecenderungan lebih banyak siswa perempuan pada jenjang MIN. Selain itu, pada gambar 4.2 di atas terlihat bahwa hampir setiap fakultas memiliki perbedaan yang sangat jauh antara jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Dari gambar di atas terlihat bahwa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Fakultas Psikologi juga terjadi karena jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan sangat ditentukan oleh kelompok fakultas yang banyak diminati masyarakat. Terdapat kecenderungan lebih banyak mahasiswa perempuan daripada mahasiswa laki-laki.

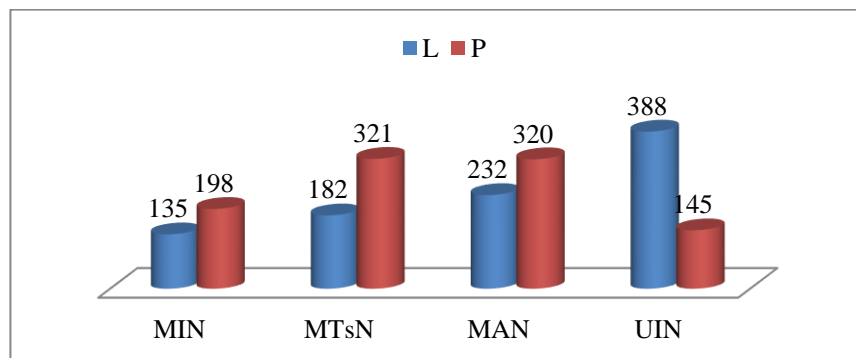
2. Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar keempat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Melalui standar ini, dituntut adanya

keseimbangan antara jumlah guru laki-laki dan perempuan. Keseimbangan ini tidak hanya dari jumlah tetapi juga dari proporsional dari jenjang pendidikan dan keterlibatan dalam *inservice training*. Hal ini juga berlaku untuk tenaga kependidikan seperti pustakawan, laboran dan lain-lain.



Gambar 4.3. Capaian Standar Kependidikan

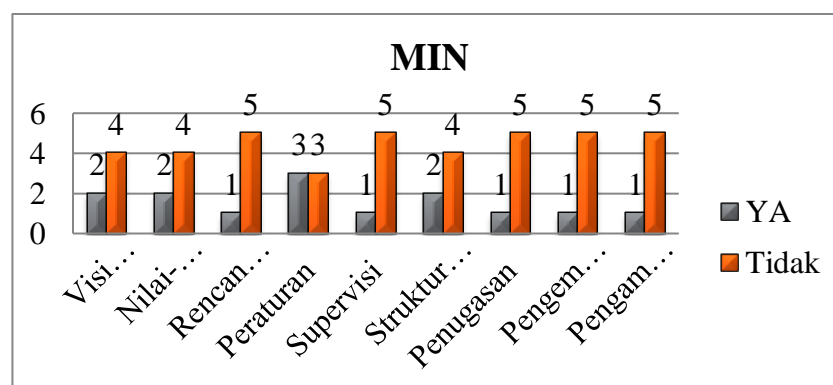


Gambar 4.4. Capaian Standar Tenaga Pendidik

Capaian pada Standar Pendidik dan tenaga kependidikan sangat bervariasi antar jenjang pendidikan. Dari gambar 4.2 di atas diperoleh informasi bahwa hasil terendah didapatkan pada tingkat MIN dan paling baik pada MTsN dan MAN serta UIN. Selain itu, pada gambar 4.3 terlihat bahwa hasil terendah juga diperoleh pada tingkat MIN dan paling baik pada UIN.

3. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan digunakan untuk mengatur terjaminnya terlaksana kesetaraan gender di sekolah. Pengaturan dimulai dengan visi dan misi sekolah yang memuat jaminan tersebut. Nilai dan norma sekolah harus bisa diterima oleh laki-laki dan perempuan. Aktifitas dan peraturan dan bantuan edukatif pembelajaran yang dibuat sekolah harus dapat diakses, dimanfaatkan dan dikontrol oleh siswa laki-laki dan perempuan. Pada standar pengelolaan juga diatur temuan, teguran dan arahan yang diberikan oleh pengawas. Struktur organisasi sekolah dan penugasan kepada guru harus dilakukan secara berimbang untuk guru dan staf laki-laki dan perempuan. Keputusan yang dilakukan pada rapat harus dimusyawarahkan secara bersama antara laki-laki dan perempuan.

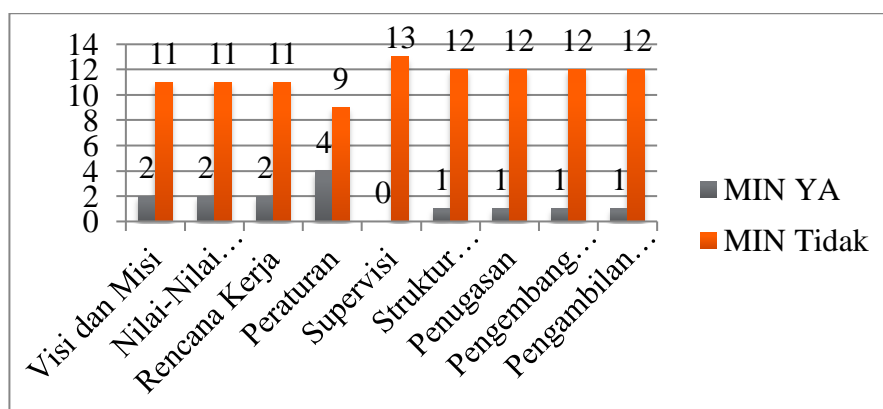


Gambar 4.5. Capaian Sekolah Pada Srandar Pengelolaan MIN

Pada standar pengelolaan yang ditampilkan pada gambar 4.4 capaian sekolah di bawah 50% pada setiap aspek standar pengelolaha. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa pada tingkat MIN secara umum mereka belum mampu mengintegrasikan kesetaraan gender dalam visi dan misi, penugasan oleh kepala sekolah, supervisi sekolah dan pengembangan karir. Namun

demikian, dalam pelaksanaan nilai-nilai dan norma, serta rencana kerja secara praktik sudah diterapkan seperti pada pencalonan pengurus osis dan kegiatan lainnya melibatkan siswa laki-laki dan perempuan, dan melibatkan guru perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan program kerja. dalam nilai-nilai, sekolah tidak membedakan cara memperlakukan etika pada guru laki-laki dan perempuan. Penugasan diberikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru. Penerapan yang belum maksimal ini disebabkan oleh ketidaktahuan pihak sekolah dengan konsep sekolah berbasis gender.

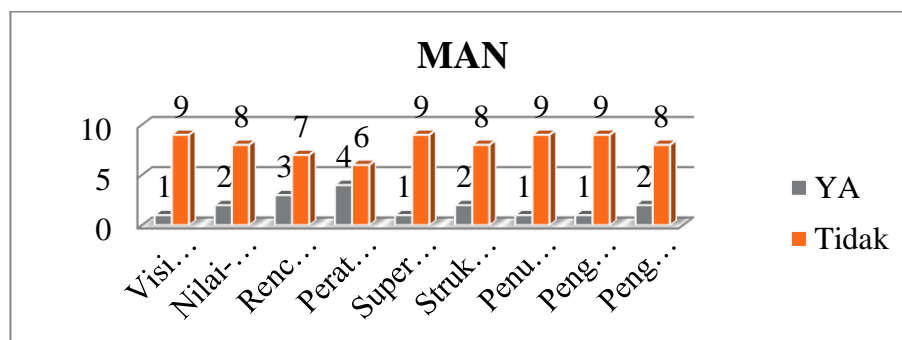
Selain itu, di MAN 2 Indragiri Hilir memiliki suatu rencana kerja yang mencantumkan kesetaraan gender, yaitu kegiatan Fiqh Wanita yang diperuntukkan khusus siswa perempuan sedangkan bagi siswa laki-laki diberikan fasilitas kegiatan khutbah jum`at, muadzin, dan prosesi pelaksanaan shalat jenazah.



Gambar 4.6. Capaian Sekolah Pada Srandar Pengelolaan MTsN

Pada standar pengelolaan yang ditampilkan pada gambar 4.5 capaian sekolah di bawah 50% dengan capaian terendah. Sama halnya dengan MIN,

pada tingkat MTsN secara umum mereka belum mampu mengintegrasikan kesetaraan gender dalam visi dan misi, penugasan oleh kepala sekolah, supervisi sekolah dan pengembangan karir. Namun demikian, dalam pelaksanaan nilai-nilai dan norma, serta rencana kerja dan peraturan secara praktik sudah diterapkan seperti pada pencalonan pengurus osis dan kegiatan lainnya melibatkan siswa, dan melibatkan guru perempuan dalam pelaksanaan program kerja. Peraturan yang diterapkan adil bagi laki-laki maupun perempuan.



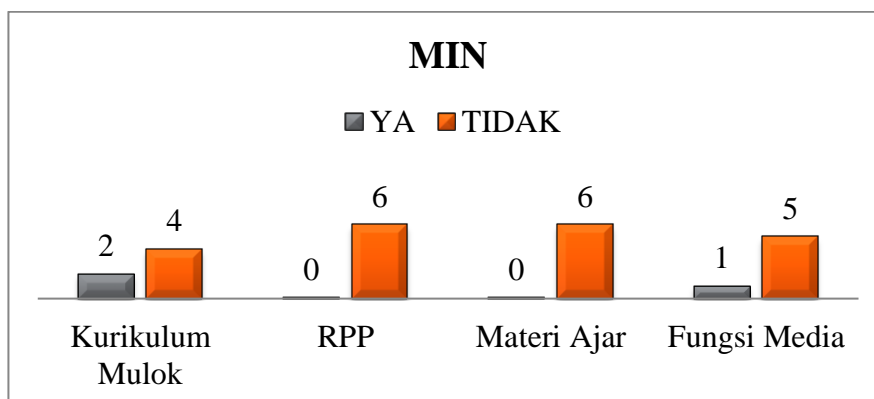
Gambar 4.7. Capaian Sekolah Pada Srandar Pengelolaan MAN

Pada standar pengelolaan yang ditampilkan pada gambar 4.6 capaian sekolah di bawah 50% dengan capaian terendah. Pada tingkat MIN secara umum mereka belum mampu mengintegrasikan kesetaraan gender dalam visi dan misi, penugasan oleh kepala sekolah, supervisi sekolah dan pengembangan karir. Namun demikian, dalam pelaksanaan nilai-nilai dan norma, serta rencana kerja secara praktik sudah diterapkan seperti pada pencalonan pengurus osis dan kegiatan lainnya melibatkan siswa, dan melibatkan guru perempuan dalam pelaksanaan program kerja. Selain itu, di MAN memiliki suatu rencana kerja yang mencantumkan kesetaraan gender, yaitu kegiatan Fiqh Wanita yang diperuntukkan khusus siswa perempuan

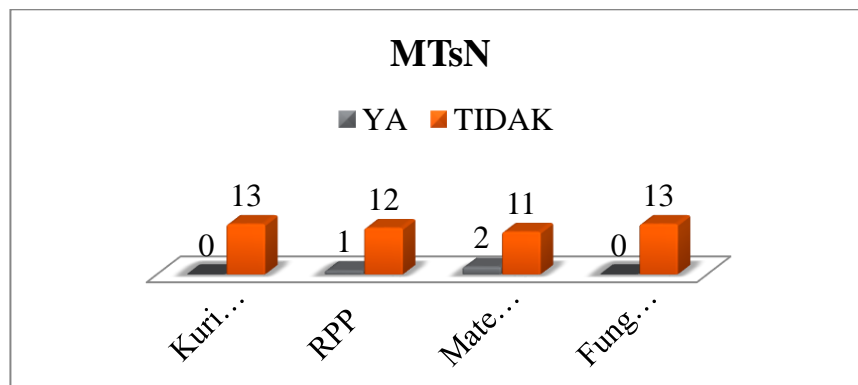
sedangkan bagi siswa laki-laki diberikan fasilitas kegiatan khutbah jum`at, muadzin, dan prosesi pelaksanaan shalat jenazah.

4. Standar Isi

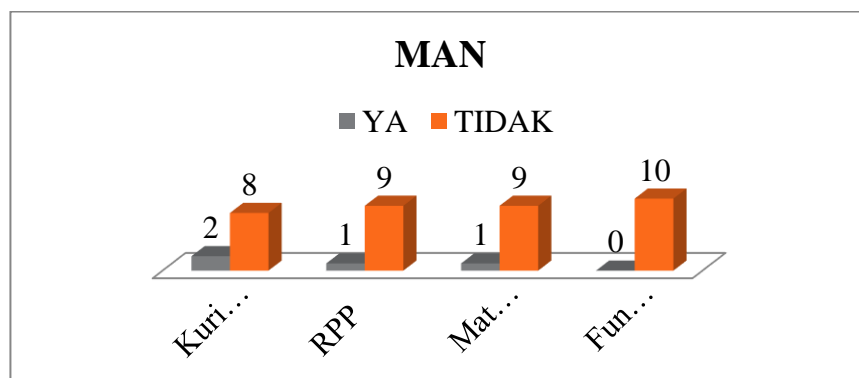
Standar pada standar ini terdapat 5 indikator yaitu pemilihan materi muatan lokal yang responsive gender yaitu kurikulum materi mulok, RPP sudah dirancang responsif gender, materi ajar sudah dirancang dan dilaksanakan dengan adil dan responsif gender, dan peluang yang sama bagi siswa laki dan perempuan dalam menggunakan media pembelajaran serta fungsi media dalam mendorong siswa laki-laki dan perempuan untuk dapat konsentrasi dalam belajar.



Gambar 4.8. Capaian Sekolah Pada Srandar Isi MIN



Gambar 4.9. Capaian Sekolah Pada Srandar Isi MTsN

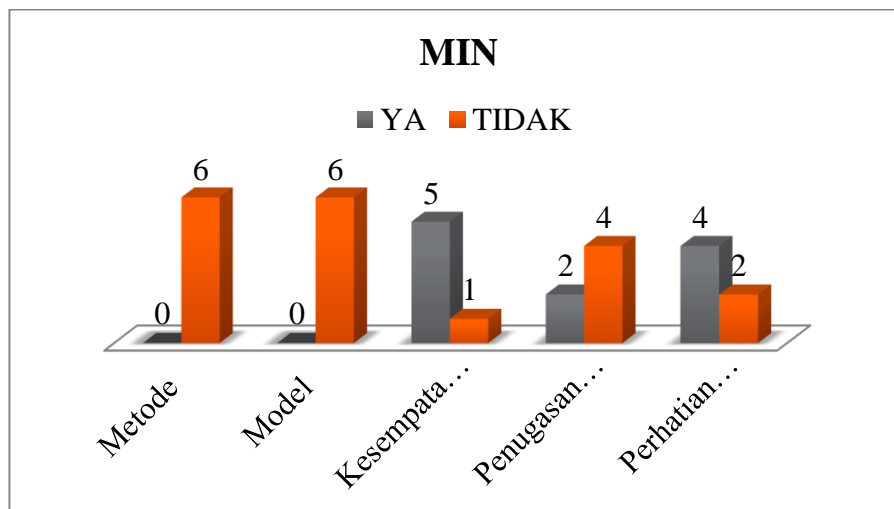


Gambar 4.10. Capaian Sekolah Pada Srandar Isi MAN

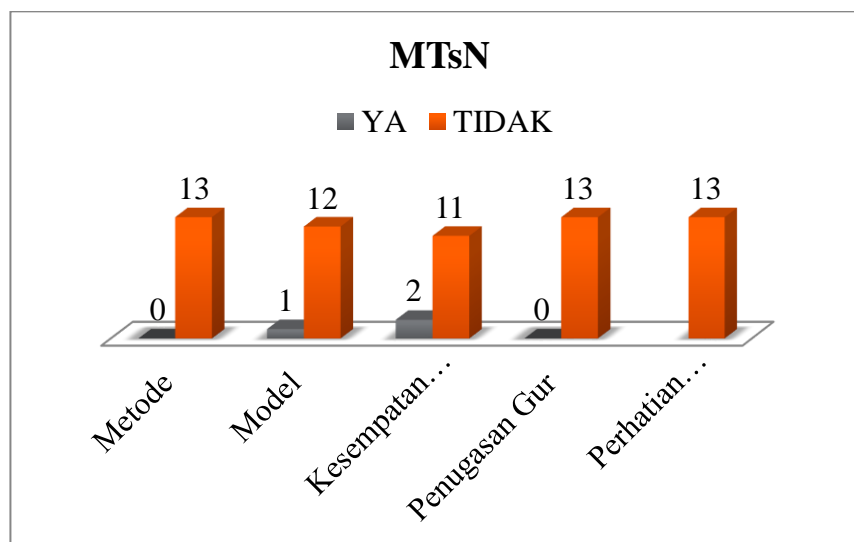
Dari gambar di atas dapat dilihat capaian pada level MTsN dan MAN lebih rendah dibandingkan jenjang sekolah MIN. Hal ini terjadi karena pada level MTsN dan MAN mereka belum memprogram perbedaan kegiatan dan fasilitas mengingat usia karakter siswa yang mengikuti pendidikan. Pada tingkat MIN kebutuhan akan perbedaan justru sangat terasa tetapi sekolah belum bisa memfasilitasi karena sebenarnya pembelajaran sudah dirancang dan dilaksanakan secara berkeadilan hanya saja untuk responsif gender belum tertuang secara tertulis (teradministrasi).

5. Standar Proses

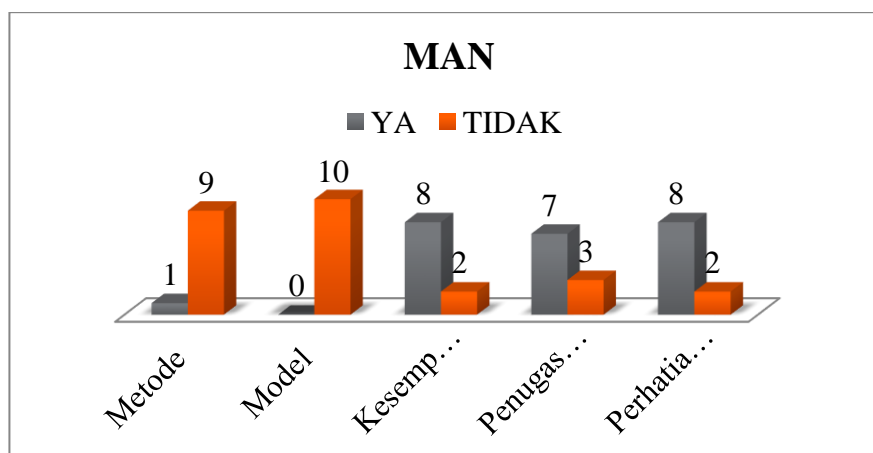
Standar ke empat merupakan standar proses, standar ini memastikan bahwa siswa laki-laki dan perempuan mendapatkan akses atau perhatian yang sama dalam proses pembelajaran. Oleh karena pengalaman sosial yang beraneka ragam maka melalui standar ini guru juga diminta untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang beragam dan lebih serta memberikan kesempatan dan perhatian yang sama untuk lebih aktif belajar dan mengambil kesimpulan dari sebuah pembelajaran.



Gambar 4.11. Capaian Sekolah Pada Standar Proses MIN



Gambar 4.12. Capaian Sekolah Pada Standar Proses MTsN

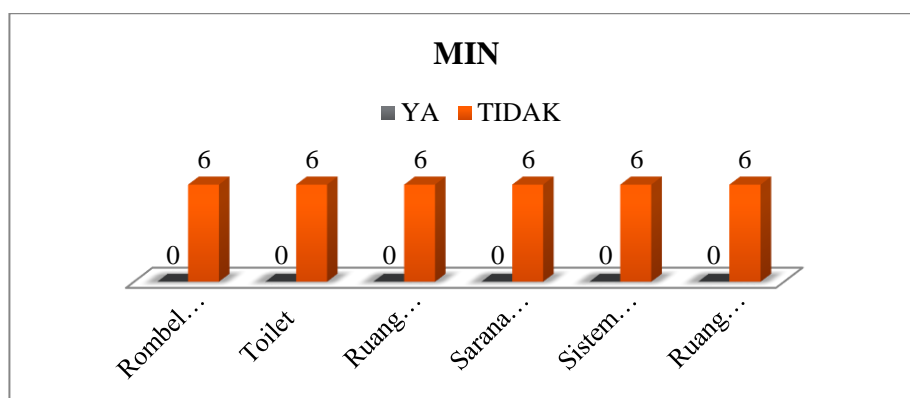


Gambar 4.13. Capaian Sekolah Pada Standar Proses

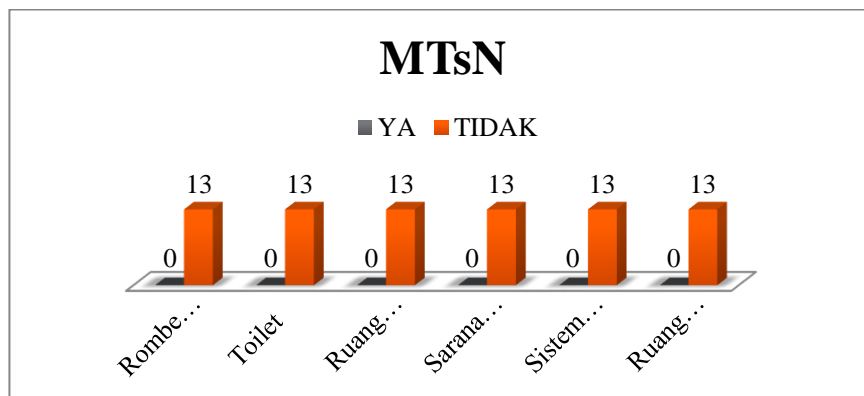
Pada gambar di atas dapat dilihat dan dipahami bahwa capaian standar proses pada semua sekolah dapat dikatakan cukup baik. Meskipun demikian, secara umum pada semua level sekolah berupaya untuk tidak membedakan perhatian dan perlakuan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran sehingga semua siswa mendapat kesempatan dan perhatian yang sama dalam mengemukakan pendapat ataupun mengerjakan tugas di kelas.

6. Standar Sarana dan Prasarana

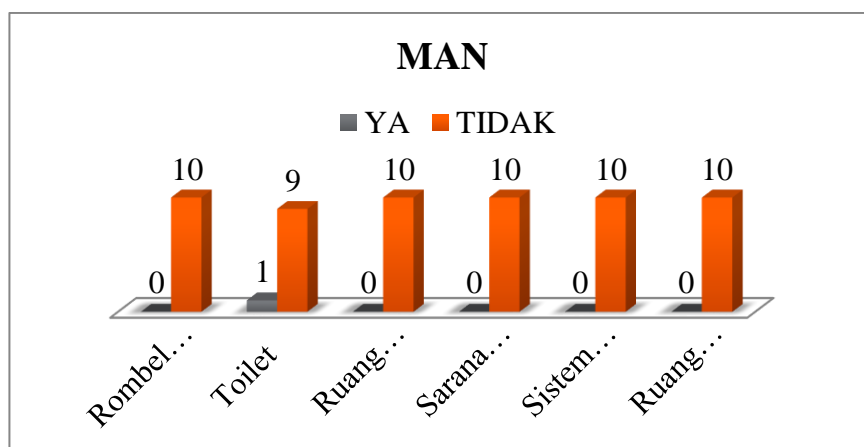
Standar Sarana dan Prasarana merupakan standar yang sangat mudah untuk dilihat secara fisik sehingga sering mendapatkan perhatian lebih baik dari pihak sekolah maupun pihak penilai. Pada standar ini diatur jumlah rombongan belajar, keberadaan toilet, penataan ruang kelas (tempat duduk di kelas), sarana taman bermain, sistem keamanan, dan tersedianya ruang layanan. Berikut rincian persekolah dengan standar pertanyaan:



Gambar 4.14. Capaian Sekolah Pada Standar Sarana dan Prasarana MIN



Gambar 4.15. Capaian Sekolah Pada Srandar Sarana dan Prasarana MTsN

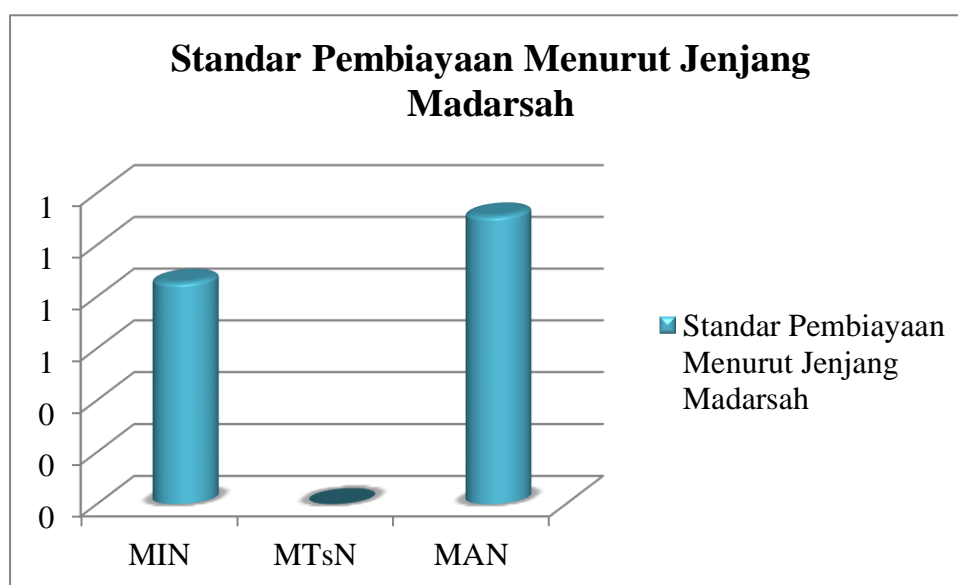


Gambar 4.16. Capaian Sekolah Pada Srandar Sarana dan Prasarana MAN

Capaian pada standar sarana dan prasarana pada semua jenjang sekolah seperti ditampilkan pada gambar di atas hanya mencapai 0,38%. Hanya beberapa sekolah yang menyediakan fasilitas yang berbeda untuk toilet laki-laki dan perempuan seperti di MIN, MTsN, dan MAN. Di sekolah, penyediaan toilet telah belum sepenuhnya mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan yaitu rasio untuk laki-laki dan perempuan. Banyak siswa harus memiliki rasio yang seimbang.

7. Pembiayaan

Pada standar ini dikatakan bahwa anggaran yang tersedia harus menampung kegiatan dan kebutuhan siswa, tenaga pendidik dan kependidikan secara berimbang untuk laki-laki dan perempuan. Semua warga sekolah harus dapat mengakses dan memantau anggaran sekolah serta dapat mengikuti evaluasi terhadap pembiayaan sekolah.



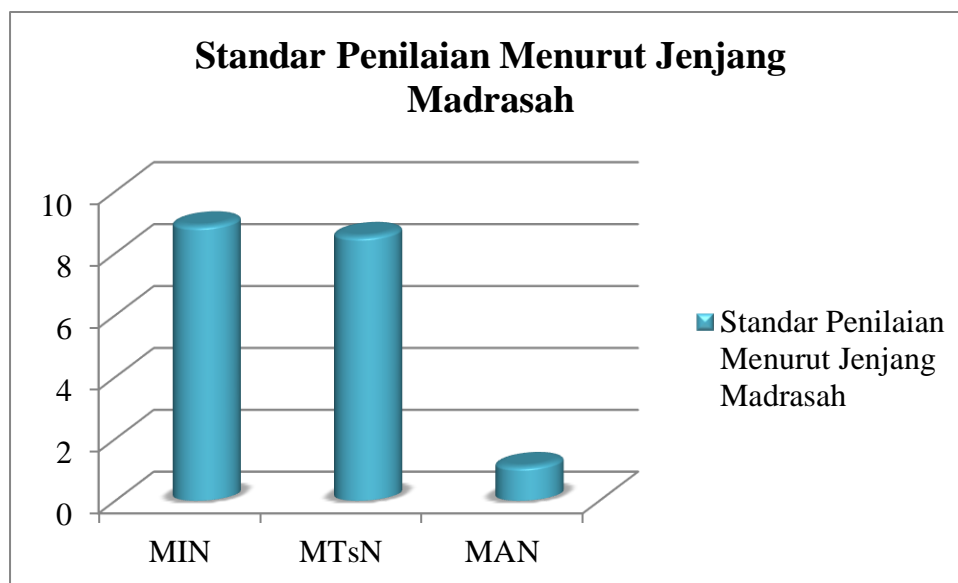
Gambar 4.17. Capaian Sekolah Pada Standar Pembiayaan

Tidak berbeda dengan standar sebelumnya, pada standar pembiayaan MTsN juga mendapatkan nilai yang lebih rendah dari jenjang sekolah lainnya. Tidak ditemukan sekolah yang secara khusus menganggarkan kegiatan sekolah berbasis gender pada programnya. Secara umum juga belum semua pihak punya akses dan evaluasi terhadap anggaran sekolah.

8. Penilaian

Menurut standar ini, penilaian harus mempertimbangkan budaya, perubahan karakter serta kodrat laki-laki dan perempuan. Secara umum,

sekolah tidak bermasalah dengan penilaian karena selama ini mereka juga tidak membedakan siswa laki-laki dan perempuan dalam penilaian. Namun demikian, sekolah tidak mendapatkan capaian yang tinggi pada standar ini karena kegiatan tidak dibuat dalam rencana tertulis.



Gambar 4.18. Capaian Sekolah Pada Srandar Penilaian

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penyajian data di atas, ada beberapa hal yang dapat dipahami sebagai berikut.

1. Standar Siswa

Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa jumlah siswa perempuan lebih mendominasi dibanding siswa laki-laki, khususnya pada jenjang MTsN dan MAN. Hal ini disebabkan oleh tinggi peminat sekolah di bawah kementerian agama dari kalangan perempuan.

2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa laki-laki mendominasi dalam aspek ke tenaga kependidikan., sedangkan perempuan mendominasi dalam aspek ke tenaga pendidik. Dalam masyarakat yang maju dan dalam memenuhi berbagai kebutuhan siswa sebaiknya komposisi tenaga pendidik dan kependidikan mulai dipertimbangkan sebagaimana figur orang tua adalah ayah dan ibu adalah laki-laki dan perempuan, figur yang seimbang akan memberikan kontribusi terhadap masukan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran maupun dalam pengambilan keputusan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Keseimbangan komposisi dimaksud sebaiknya terus dikembangkan dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan, dengan maksud agar figur ayah dan ibu tersebut dapat dijumpai di sekolah. Keseimbangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan memperluas kesempatan laki-laki dan perempuan membangun relasi gender yang terimplementasi dalam terwujudnya etika pergaulan antara mereka dengan komposisi yang seimbang. Keluasan hubungan antara laki-laki dan perempuan menciptakan iklim kondusif terhindarnya perilaku menyimpang dan kekerasan, karena masing-masing mendapatkan kesempatan membangun relasi dengan perempuan maupun laki-laki. Hal tersebut terlihat pada sekolah yang hanya menerima siswa laki-laki atau perempuan saja, ada kecenderungan kekurangan belajar sosialisasi/belajar membangun relasi dengan lawan jenis. Belajar komunikasi dengan lawan jenis merupakan kebutuhan siswa dalam menemukan etika yang pantas baginya sebagai bekal terjun dalam

masyarakat. Bagaimana bergaul dengan lawan jenis yang lebih muda, sebaya atau yang lebih tua merupakan wujud tata nilai etika pergaulan yang harus kita kembangkan sesuai dengan nilai budaya setempat.

3. Standar Pengelolaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan nilai-nilai dan norma, serta rencana kerja secara praktik sudah diterapkan seperti pada pencalonan pengurus osis dan kegiatan lainnya melibatkan siswa, dan melibatkan guru perempuan dalam pelaksanaan program kerja. Pemakaian pengelolaan sumber dana dan biaya penyelenggaraan pendidikan yang responsif gender, merupakan anjuran pemerintah. Pengarusutamaan gender bidang Pendidikan adalah bagaimana pengelola sumber dana, dapat mengaplikasikan dana yang ada sesuai dengan kebutuhan siswa, guru dan tenaga non kependidikan, sesuai dengan jumlah masing-masing dengan tidak membedakan jenis kelamin. Karena kebutuhan yang diperlukan laki-laki, berbeda dengan kebutuhan yang diperlukan perempuan, meliputi kebutuhan pengembangan diri, kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kebutuhan spiritual. Anggaran yang sudah mempertimbangkan jumlah kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam suatu organisasi disebut anggaran yang responsif gender. Sedangkan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah seharusnya mulai mengacu pada kebutuhan sesuai jumlah laki-laki dan perempuan yang akan

memanfaatkan sarana dimaksud. Sebagai ilustrasi adalah kamar mandi laki-laki dan perempuan mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang tidak sama, meja belajar yang harus disesuaikan dengan kondisi pakaian perempuan, dan sarana prasarana lain dalam proses pembelajaran, perlu disesuaikan dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan, utamanya dalam melindungi alat reproduksi bagi perempuan untuk menjaga kesehatannya. Kepandaian dalam mengelola sarana dan prasarana, bisa sebagai alat untuk membiasakan siswa dan guru saling hormat menghormati satu dengan yang lainnya, karena masing-masing merasa nyaman dan kebutuhannya dapat dipenuhi sekolah.

Dengan kondisi sarana prasarana yang dimodifikasi dengan mengingat kebutuhan laki-laki dan perempuan akan menghindari pula perilaku kekerasan psikis maupun psikologis oleh sesama siswa maupun guru. Kita semua tahu bahwa sekolah adalah tempat belajar dan mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan talenta masing-masing, sehingga kenyamanan penataan sarana dan prasarana, dengan mempertimbangkan lingkungan sumber daya alam, merupakan ujud kepedulian sekolah dan warganya terhadap penyelamatan lingkungan, sekaligus menjadi tempat istirahat yang nyaman bagi siswa setelah beberapa jam berada dalam kelas. Penataan yang mempertimbangkan lingkungan dan budaya daerah merupakan kebutuhan yang mendesak, agar kenikmatan situasi sekolah mengimbas dalam masyarakat. Perlu kiranya sekolah mempertimbangkan kapasitas sarana dan prasarana sekolah dalam penentuan penerimaan siswa

baru, sehingga kondisi yang sesuai dan seimbang dapat diciptakan, dalam upaya mengurangi perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai budaya kita. Penerimaan yang dipaksakan melebihi kapasitas sarana dan prasarana sekolah, akan mengurangi hak siswa untuk dapat belajar dengan kondisi nyaman dan optimal, tentu berakibat prestasi sekolah tidak dapat dipertahankan sebagaimana layaknya.

4. Standar Isi

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa kebutuhan akan perbedaan justru sangat terasa tetapi sekolah belum bisa memfasilitasi karena sebenarnya pembelajaran sudah dirancang dan dilaksanakan secara berkeadilan hanya saja untuk responsif gender belum tertuang secara tertulis (teradministrasi).

Standar isi merupakan rujukan pokok dalam pembuatan silabus dan rencana program pembelajaran. Kaitannya dengan penyusunan silabus dan RPP, kesetaraan dan keadilan gender perlu dihadirkan sebagai bahan ajar pokok atau suplemen pada kompetensi dasar yang relevan. Jika dikehendaki yang lebih detail lagi aspek kesetaraan dan keadilan gender ini, silabus dan RPP yang disusun guru sebaiknya mampu mengintegrasikan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender.

Pada tahun 2011 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mengalokasikan anggaran untuk dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah sebanyak lima ratus juta rupiah yang akan digunakan untuk pengembangan silabus dan rencana program pembelajaran jenjang

pendidikan dasar pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. *Pilot project* anggaran responsif gender itu ditunjuk sebanyak 14 SKPD lain di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kepedulian kementerian di atas merupakan upaya peningkatan profesionalisme guru dalam membuat silabus dan rencana program pembelajaran pada setiap mata pelajaran di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Karena diyakini bahwa pengembangan silabus dan rencana program pembelajaran merupakan awal dari keberhasilan proses pembelajaran di kelas.

5. Standar Proses

Berdasarkan wawancara dengan salah satu kepala sekolah mengatakan hal ini sudah berjalan sejak lama dan bukan dikarenakan diprogramkan untuk sekolah berwawasan gender. Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 standar proses pembelajaran adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembelajaran adalah hal yang harus dimengerti dan dipahami oleh setiap guru. Selain itu guru diharapkan mampu membangun motivasi dan keberanian siswa dalam unjuk kecakapan, baik terhadap siswa laki-laki atau pun perempuan dalam menggapai cita-citanya tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang ekonomi, dan budaya. Pemahaman terhadap kebutuhan siswa laki-

laki dan perempuan dalam masalah kesulitan belajar maupun kesulitan bersosialisasi dengan sesama dan lain jenis merupakan prioritas yang akan dicapai di dalam proses pembelajaran.

Pembentukan karakter merupakan proses pembelajaran dan pembiasaan yang harus dilakukan terus menerus agar nilai-nilai kehidupan benar benar terinternalisasi dalam jiwa pembelajar, dan masyarakat merupakan tempat belajar pembiasaan bersosialisasi, sehingga diperlukan pendidikan masyarakat melalui berbagai media, untuk itu diperlukan kecakapan setiap pendidik untuk mampu mempengaruhi setiap media yang dinikmati masyarakat dengan harapan apa yang sedang dilakukakan dalam proses pembelajaran di sekolah dapat dimengerti dan didukung oleh masyarakat sepenuhnya. Kondisi yang demikian perlu diperjuangkan terus menerus agar kita dapat merasakan masa depan kehidupan bangsa yang lebih bermartabat.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian pada standar sarana dan prasarana pada semua jenjang sekolah seperti ditampilkan pada gambar di atas hanya mencapai 0,38%. Pada standar ini semua fasilitas dapat dilihat secara langsung sehingga penilaian lebih objektif. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, semakin lengkap penunjang sarana prasarana dimaksud akan mempermudah guru dalam menentukan prioritas pembelajaran yang memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan

secara adil dan setara. Mengingat pentingnya permasalahan penyediaan sarana dan prasarana sekolah sehingga diperlukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan jenis kelamin, dan bagaimana implementasi pelaksanaan pengadaan sarana prasarana, apakah telah mengacu pada kebutuhan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah direncanakan, dan pelaksanaan pemeliharaan dengan memberlakukan norma hidup bersih dalam sekolah, rasa memiliki semua pihak yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada diluar lingkungan sekolah. Dengan perasaan memiliki dimaksud tentu sarana dan prasarana yang ada akan disayang dan dijaga semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan termasuk masyarakat lingkungan sekolah.

7. Standar Pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan sekolah yang secara khusus menganggarkan kegiatan sekolah berbasis gender pada programnya. Secara umum juga belum semua pihak punya akses dan evaluasi terhadap anggaran sekolah. Pada standar pembiayaan, satuan pendidikan responsif gender perlu menerapkan perencanaan dan penganggaran pendidikan responsif gender serta menjamin adanya kesamaan akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam menyusun dan memonitor penggunaan anggaran sekolah.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah, banyak dana masyarakat yang dipergunakan di dalamnya, dan dana dari sumber lain untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian masih

banyak masyarakat yang belum tahu, untuk apa penggunaan dana masyarakat dan sumber dana lainnya tersebut. Sedangkan batasan biaya standar pendidikan per siswa dalam setiap daerah, juga belum ada standar minimalnya, sehingga sekolah mencoba sendiri mencari standar bagi sekolahnya, yang bisa menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal demikian yang menyebabkan persepsi yang kurang baik dalam penggunaan biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sebenarnya berapa besar biaya minimal per siswa untuk penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, maupun Sekolah Menengah Kejuruan? Masing-masing jenis dan jenjang pendidikan mempunyai nilai standar sendiri yang berbeda-beda, tergantung dari lokasi di mana sekolah tersebut berada. Dengan demikian masyarakat menjadi sering bertanya-tanya kenapa biaya minimal standar pendidikan jarang dipublikasikan dan masyarakat yang kurang mengerti dan mempunyai penghasilan keluarga terbatas, sering mengeluh bahwa biaya pendidikan cenderung tinggi, dengan berbagai alasan biaya penyelenggaraan pendidikan.

Kita sebagai penyelenggara pendidikan, termasuk di dalamnya guru dan tenaga non kependidikan, seharusnya mulai introspeksi diri sebenarnya apa yang sedang terjadi, dan bagaimana persoalan tersebut bisa kita atasi dengan baik, dan memuaskan semua pihak atau masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam perencanaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dikenal adanya rencana anggaran

pendapatan dan biaya sekolah yang biasa disebut RAPBS, dalam RAPBS tercantum seluruh sumber pendapatan, yang akan didapatkan sekolah pada tahun yang bersangkutan, sedangkan seluruh biaya yang akan dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan, juga terlihat dengan jelas berbagai sasaran pendidikan yang diprioritaskan.

8. Standar Penilaian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah tidak bermasalah dengan penilaian karena selama ini mereka juga tidak membedakan siswa laki-laki dan perempuan dalam penilaian. Pada standar penilaian, satuan pendidikan responsif gender perlu membuat target implementasi isu gender pada soal tes dan tugas-tugas terstruktur serta mengembangkan alat penilaian yang tidak menyulitkan salah satu jenis kelamin dalam mengerjakan soal ujian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pengolahan data penilaian pelaksanaan program sekolah berwawasan gender di Propinsi Riau dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Secara umum madrasah di Propinsi Riau sudah mulai mengenal program sekolah berwawasan gender dan sudah punya keinginan untuk menjalankannya;
2. Dari temuan lapangan capaian sekolah pada indikator sekolah berwawasan gender cukup baik namun demikian hal ini belum karena sekolah sudah menjalankan program akan tetapi karena secara umum selama ini tidak ditemukan masalah yang serius tentang bias gender di sekolah;
3. Secara umum MTsN capaiannya lebih rendah dari jenjang sekolah lainnya;
4. Standar Sarana dan Prasarana merupakan indikator yang paling rendah capaiannya pada semua jenjang sekolah.

B. Saran

Dari hasil temuan diatas dapat diberikan beberapa saran yang dapat meningkatkan capaian semua standar pada indicator sekolah berwawasan gender yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Riau melalui Kementerian Agama disarankan untuk melakukan pendampingan ke madrasah-madrasah untuk perencanaan dan

pelaksanaan program sekolah berwawasan gender terutama pada standar proses;

2. Sekolah perlu diberikan dana untuk sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan kepada siswa terutama melalui sarana dan prasarana;
3. Kementerian Agama melalui bidang terkait perlu melakukan kajian lanjutan untuk melihat faktor rendahnya capaian di tingkat MTsN;
4. Kementerian Agama Kabupaten/kota yang memiliki capaian rendah disarankan untuk meningkatkan komunikasi dalam menjalankan program dengan Kementerian Agama Tingkat Provinsi.

DAFTAR REFERENSI

- Adriana, I. (2009). Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan). *Tadris, vol 4, No.*
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2016). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. (Badan Pusat Statistik, Ed.). Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa.
- Boozer, M., Ranis, G., Stewart, F., & Suri, T. (2003). *Paths to Success: The Relationship Between Human Development and Economic Growth*. Center Discussion Paper No. 874 Economic Growth Center Yale University, 1-49.
- BPS. (2015a). *Policy Brief Peningkatan Kinerja Pertanian Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan*. Jakarta.
- Moser, Caroline O. N. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training*. London: Routledge
- Narayan, Deepa. November, (1995). *Toward Participatory Research*. World Bank Technical Paper No.307. Washington, D.C.:The World Bank.
- Nursini, dkk (2011). “Evaluasi Kebijakan Responsive Gender Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Barru dan Pangkep Sulawesi Selatan”.Laporan Penelitian Puslitbang Kependudukan dan Gender UNHAS.
- Nurfitriah, (2011). Pemberdayaan Perempuan Pesisir Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kab. Bantul. Retrived 29/9/2011.
- Pierre-Richard Agenor Otaviano Canuto, (2013). “*Gender Equality and Economic Growth in Brazil A Long-Run Analysis*. *The World Bank Poverty Reduction and Economic Management Network January 2013*. Policy Working Paper 6348
- UNDP. (1996). *Human Development Report 1996*. New York Oxford: Oxford University Press.
- _____. (2015). *Issue Paper Prepared for the Expert Group Meeting on “Gender Equality in Human Development –Measurement Revisited”*. UNDP: Human Development Report Office
- _____. (2010). Partisipasi Perempuan dalam Politik. UNDP Indonesia, Jakarta.
- Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. (2000). *Economic Growth and Human Development*. *World Development Vol. 28, No. 2*, 197-219
- Tierney, Helen. (ed.) *Women's studies encyclopedia*, Vol.1. Views from the sciences. New York, London: Greenwood, 1989.